

SKRIPSI

DWI PRASETYO

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA

(Studi Kasus Di PT. Wismaraya Ayamas
Andhika Plaza Building B1/38-Q, Jalan Simpang Dukuh
Nomor 38-40 Surabaya)



*KK.
Per. 2258/97.
Pra.
p.*

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DI PERUSAHAAN SWASTA**

**(Studi Kasus Di PT. Wismaraya Ayamas
Andhika Plaza Building B1/38 - Q, Jalan Simpang Dukuh
Nomor 38 - 40 Surabaya)**

SKRIPSI

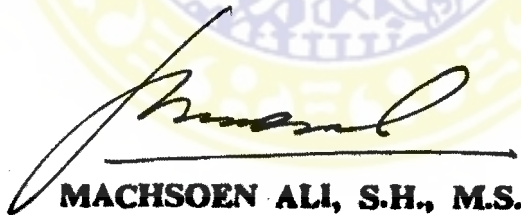
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas
Dan Memenuhi Syarat - Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DWI PRASETYO

NIM. 039213477

Pembimbing



MACHSOEN ALI, S.H., M.S.


NIP. 130 355 366

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

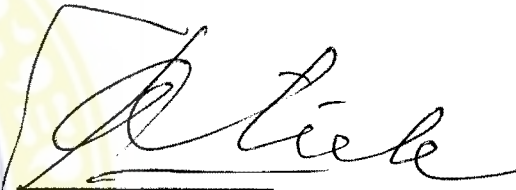
**Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
pada tanggal 22 Januari 1997**

Panitia Penguji :

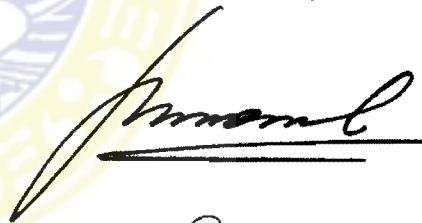
1. Ketua : R. Iadiarsoro, S.H.



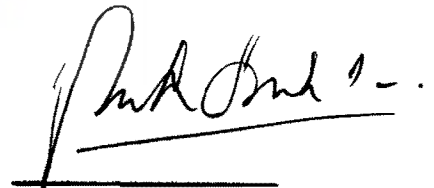
2. Sekretaris : Tatiek Sri Djatmisti, S.H., M.S.



**3. Anggota :
Machsoen Ali, S.H., M.S.**



M. L. Souhoka, S.H., M.S.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Dalam suatu perusahaan, pengusaha mempunyai tanggung jawab atas jalannya perusahaan, karena itu ia harus berusaha mengambil keputusan terhadap setiap yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan tersebut. Disamping itu, karena tanggung jawab itu pula, pengusaha ingin mempertahankan kekuasaannya, kebebasannya sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan tentang soal-soal yang berpengaruh pada perkembangan perusahaan itu maju atau tidaknya.
- b. Perselisihan adalah pertentangan antara pengusaha dengan pihak pekerja karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, perbedaan kehendak dan perbedaan-perbedaan lainnya, sehingga tidak ada persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan keadaan dalam suatu perusahaan.
- c. Dalam penerapan atau pelaksanaan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4), pekerja dijamin oleh negara berdasarkan aturan hukum yaitu

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1980. Bila pihak yang dituntut untuk melaksanakan putusan P4 tidak secara sukarela mau melaksanakannya, maka fiat eksekusi dapat dimohonkan kepada Pengadilan Negeri oleh pihak yang menang atau pihak yang dikabulkan tuntutananya, setelah putusan P4 mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat. Sehingga dengan dikabulkannya tuntutan tersebut maka terhadap hak yang diterima merupakan suatu prestasi yang harus diterima, seperti yang tercantum dalam keputusan.

2. Saran

- a. Kewenangan terhadap pengusaha harus dibatasi. Untuk itu pemerintah harus selalu mengadakan pengawasan secara intensif termasuk memberikan batasan melalui peraturan khusus yang mengatur tentang hak-hak dan kewenangan pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan menyertakan pula suatu sanksi hukum tegas dan keras bagi pengusaha yang melakukan tindakan sewenang-wenang termasuk pula dalam mengadakan pemutusan hubungan kerja dimana tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan.

- b. Sebagai upaya untuk menghindari perselisihan dibentuk suatu organisasi kerja yang bertugas tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja tetapi juga kepada pengusaha dalam hal memberikan perlindungan dan pertimbangan dalam setiap mengambil suatu kebijaksanaan kepada para pekerjanya.
- c. Se jauh mungkin dihindari permohonan fiat eksekusi oleh Pengadilan Negeri, yang sampai sekarang masih berperan sangat penting supaya keputusan P4 dapat dilaksanakan, hal ini juga menguntungkan bagi pihak pekerja yang mengeluh akibat terlalu berat dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus dan mengganti apabila permohonan fiat eksekusinya dikabulkan. Di samping itu, untuk meluruskan pendapat umum bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam usaha penyelesaian perselisihan perburuhan hanya memihak pengusaha, diharapkan dalam mengeluarkan keputusan harus adil dan sesuai dengan peraturan yang ada serta melihat kondisi dari para pekerja.